



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN TA 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok disusun berdasarkan Inpres Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Arosuka, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Solok



ZULHENDRI, SKM, M.Kes
Nip. 19660604 198703 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 adalah “**Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat**”

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis. Adapun Laporan Kinerja pada intinya adalah “ Pencapaian Laporan Kinerja (*performance result*) “ selama Tahun 2024 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja (*performance plan*)” Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi (*strategic plan*) Dinas Kesehatan 2021 – 2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 4 (Empat) indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 , disimpulkan bahwa 3 (Tiga) indikator kinerja ber kriteria **Sangat Baik** dan 1 (Satu) indikator ber kriteria **Baik**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Gambaran Umum Organisasi.....	4
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahunan	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	58
C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	68
 BAB IV PENUTUP	
Penutup	70
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga dan institusi pemerintah yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance).

Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, diharapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institusi/unit kerja tidak lagi sekedar laporan kesan-kesan dan pesan-pesan, tetapi menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat, hal ini sejalan dengan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, sebagai salah satu instansi di Pemerintahan Kabupaten Solok mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, melalui kewenangan atau mandat yang diberikan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan mandat ini, perlu adanya suatu akuntabilitas yang baik.

Laporan Kinerja sebagai suatu bentuk laporan akuntabilitas, merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi/instansi kepada pemberi mandat. Guna menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan di suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktifitas di instansi tersebut harus dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran tingkat pencapaian terhadap suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Solok menyusun Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang dapat menggambarkan tingkat kinerja sesungguhnya.

B. Landasan Hukum.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945.
3. Landasan Operasional :
 - a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera tengah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 - e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- g) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- k) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- m) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu.
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- o) Peraturan Daerah No 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
2. Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Solok di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

1) Kelembagaan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 34 Tahun 2023 tentang “Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kesehatan”.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Program, informasi dan hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas.

2. Subbag hukum, kepegawaian dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas

Bidang–bidang terdiri dari :

1. Bidang Kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan jiwa, kesehatan kerja dan olah raga.
2. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungan.
3. Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
4. Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, maka disusun struktur organisasi sebagaimana bagan dibawah ini :

STRUKTUR

2). Sumber Daya.

a) Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data Bulan Desember 2024 jumlah pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan jajarannya sebanyak 1.555 orang (PNS, THL nagari dan Nusantara Sehat).

Klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural sebanyak 25 orang, Terdiri dari Pejabat Eselon II B sebanyak 2 orang, III/a 1 orang, Pejabat eselon III/b 8 orang, Pejabat Eselon IV/a 13 orang dan Pejabat eselon IV/b 1 orang sedangkan Pejabat Fungsional sebanyak 1.530 orang dan staf Fungsional Umum sebanyak 253 orang.

b) Tabel I.1

Keadaan Tenaga berdasarkan Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah Tenaga
1.	Tenaga Medis	99 orang
2.	Tenaga Keperawatan	359 orang
3.	Tenaga Kebidanan	502 orang
4.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 orang
5.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	25 orang
6.	Tenaga Gizi	42 orang
7.	Tenaga Teknik Biomedik	128 orang
8.	Tenaga Keterampilan Fisik	6 orang
9.	Tenaga Keteknisan Medik	23 orang
10.	Tenaga Kefarmasian	54 orang
11.	Tenaga Dukungan Manajemen	253 orang
12.	Tenaga fungsional Dinkes	18 orang
13.	Struktural	25 orang

Tabel I.2
Sarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Solok Tahun 2023

No	Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Pemerintah	1
2.	Puskesmas Non Rawatan	8
3.	Puskesmas Rawatan	11
4.	Puskesmas Pembantu	83
5.	Poskesri	263
6.	Ambulance	45
7.	Posyandu	628
8.	Laboratorium Daerah	1
9.	IFK	1

b) Fungsi Strategis Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Solok. Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya.

c) Permasalahan Utama Dinas Kesehatan

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2021 s/d 2026 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM) maka indikator yang menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) masih menjadi masalah di Kabupaten Solok (Capaian Tahun 2024 : Jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang dan capaian tahun 2023 : Jumlah Kematian Ibu sebanyak 7 orang, Jumlah Kematian bayi tahun 2024 sebanyak 49 orang dan tahun 2023 sebanyak 51 orang. Kematian ibu dan kematian bayi sudah mengalami penurunan namun masih

tetap menjadi prioritas masalah di Kabupaten Solok. Hal ini dapat disebabkan karena masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat terhadap kehamilan beresiko serta kurang kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi, demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), Pneumonia, Meningitis (encepalitis), sepsis, kelainan jantung, kelainan bawaan.

- Upaya untuk menurunkan AKI, AKB dan AKABA dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas PONED, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum optimal, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

d) Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2024, disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ ikhtisar rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2024 antara Bupati Solok dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Dalam Bab ini menjelaskan capaian Kinerja untuk Setiap IKU dan Realisasi Anggaran yang di gunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu.

A. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dan penetapan sasaran kinerja pegawai

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang:

- (a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
- (b). Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, Program; dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Solok selama tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

**Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
1	Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usis secara holistik dan berkelanjutan	1	Angka kematian ibu	205/100.000 KH
		2	Angka kematian bayi	8,35/1000 KH
		3	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)	14%
		4	Angka kesakitan	12,75%

C. Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
1	Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usis secara holistik dan berkelanjutan	1	Angka kematian ibu	205/100.000 KH
		2	Angka kematian bayi	8,35/1000 KH
		3	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)	14%
		4	Angka kesakitan	12,75%

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Solok TA 2024

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	134.266.359.298	125.728.993.300	93,69
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.724.495	105.184.208	99,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.547.804	33.239.504	99,08
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.925.108	58.898.908	99,96
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.614.705.197	79.799.884.694	96,55
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.402.166	94.619.912	97,14
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester skpd	193.599.204	192.346.454	99,35
7	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	1.800.000	1.800.000	100
8	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	85.516.677	83.057.938	97,12
9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84.292.548	81.988.658	97,27
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.347.159	172.300.375	99,40
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.334.375	473.514.466	94,64
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.887.380	29.040.501	97,17
14	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	100
15	Penyediaan Jasa Perizinan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	270.270.000	268.913.929	99,50
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22.871.400	22.772.420	99,57
17	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	50.875.809.009	45.201.957.005,47	88,85

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	68.270.636.072	59.146.127.264	86,63
19	Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	629.451.000	441.610.827	70,16
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	519.693.708	202.100.708	38,89
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	124.964.981	122.430.100	97,97
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	167.730.000	92,831.190	55,35
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	417.300.000	352.184.910	84,40
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6.140.000	3.750.000	61,07
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	16.874.900	16.014.500	94,90
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.690.000	9.980.810	93,37
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	623.365.200	607.373.390	97,43
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.110.000	4.760.000	93,15
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	555.505.700	477.639.628	85,98
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.950.000	7.550.000	22,91
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	144.331.900	45.644.000	31,62
32	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.653.655.776	3.128.869.879	67,23
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.154.396.408	1.125.929.868	97,53

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
34	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	572.791.158	516.344.908	90,15
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	171.574.248	165.272.211	96,33
36	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	396.052.000	183.258.029	46,27
37	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	45.494.400	40.928.800	89,96
38	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.268.573.800	3.230.697.892	75,69
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.756.747.700	12.693.318.900	99,50
40	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	70.000.000	5.459.918	7,80
41	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.402.155.686	2.184.333.662	90,93
42	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.081.863.298	3.614.214.511	51,04
43	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya IFK/LAB	2.256.063.321	2.016.299.828,24	89,37
44	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	63.633.708	62,570.708	98,33
45	Invenstigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	36.700.000	5.000.000	13,62
46	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	105.504.912	93.093.902	88,24
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan GIV (ODHIV)	17.960.000	2.550.000	14,20
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.156.000	17.175.000	34,94
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	19.626.579	18.745.700	95,51
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.939.236.350	1.327.064.400	68,43
51	Pengembangan Puskesmas	11.043.574.507	10.850.900.060	98,26
52	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	98,939.439	98,94
53	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	1.251.351.800	1.215.712.346	97,15

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
54	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	2.346.074.200	2.283.818.492	97,35
55	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	4.741.714.285	4.568.091.706	96,34
56	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	61.405.800	55.070.000	89,68
57	Pengembangan Rumah Sakit	684.216.829	681.254.837	99,57
58	Pengadaan obat, bahan habis pakai, medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di failitas kesehatan	6.532.882.818	6.531.448.007	99,98
59	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP , Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	173.474.100	111.877.200	64,49
60	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15.205.000	13.890.000	91,35
61	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.544.000	3.612.000	65,15
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	442.556.650	411.698.734	93,03
62	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.539.650	9.830.234	93,27
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	257.343.000	237.683.600	92,36
64	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	174.674.000	164.184.900	94,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.583.402.591	2.313.053.980	89,54
65	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	919.971.970	880.656.900	95,73

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
66	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	509.478.321	416.834.000	81,82
67	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.153.952.300	1.015.563.080	88,01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.411.490.300	1.736.584.500	72,01
68	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	327.380.000	326.260.000	99,66
69	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.084.110.300	1.410.324.500	67,37
	J U M L A H	207.974.444.911	189.419.942.778,07	91,08

Sumber Dana Anggaran Dinas Kesehatan TA 2024

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	134.266.359.298	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.724.495	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.547.804	DAU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.925.108	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.614.705.197	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.402.166	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester skpd	193.599.204	DAU
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	1.800.000	DAU
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	85.516.677	DAU
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84.292.548	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.347.159	DAU

Program	Anggaran	Keterangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.334.375	DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.887.380	DAU
Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Perizinan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.270.000	DAU
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22.871.400	DAU
Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	50.875.809.009	DAU
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	68.270.636.072	DAU
Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	629.451.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	519.693.708	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	124.964.981	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	167.730.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	417.300.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6.140.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	16.874.900	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.690.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	623.365.200	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.110.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	555.505.700	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.950.000	DAU DAN DAK

Program	Anggaran	Keterangan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	144.331.900	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.653.655.776	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.154.396.408	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	572.791.158	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	171.574.248	DAU DAN DAK
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	396.052.000	DAU DAN DAK
pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	45.494.400	DAU DAN DAK
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.268.573.800	DAU DAN DAK
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.756.747.700	DAU
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	70.000.000	DAU DAN DAK
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.402.155.686	DAU DAN DAK
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.081.863.298	DAU DAN DAK
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya IFK/LAB	2.256.063.321	DAU
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	63.633.708	DAU DAN DAK
Invenstigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	36.700.000	DAU DAN DAK
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	105.504.912	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan GIV (ODHIV)	17.960.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.156.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	19.626.579	DAU DAN DAK
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.939.236.350	DAU DAN DAK
Pengembangan Puskesmas	11.043.574.507	DAU DAN DAK
Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	DAU

Program	Anggaran	Keterangan
Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	1.251.351.800	DAU
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	2.346.074.200	DAU
Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	4.741.714.285	DAU DAN DAK
Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	61.405.800	DAU DAN DAK
Pengembangan Rumah Sakit	684.216.829	DAU
Pengadaan obat, bahan habis pakai, medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di failitas kesehatan	6.532.882.818	DAU DAN DAK
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP , Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	173.474.100	DAU DAN DAK
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15.205.000	DAU DAN DAK
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.544.000	DAU
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	442.556.650	DAU
Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.539.650	DAU DAN DAK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	257.343.000	DAU DAN DAK
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	174.674.000	DAU DAN DAK
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.583.402.591	DAU
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	919.971.970	DAU

Program	Anggaran	Keterangan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	509.478.321	DAU
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.153.952.300	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.411.490.300	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	327.380.000	DAU DAN DAK
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.084.110.300	DAU DAN DAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan/kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) untuk memrpertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	70% - < 85%	Baik
3	55% - < 70%	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**Perbandingan Antara Terget, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024
dan Target RPJMD Kabupaten Solok**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja		Target Akhir RPJMD	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	Target (2026)	Capaian
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	210/100.000 KH	205/100.000 KH	112,72/100.000 KH	90,55/100.000 KH	146,32	155,83	195/100.000 KH	125,22
	Angka kematian bayi	8,56/1000 KH	8,35/1000 KH	8,21 / 1.000 KH	8,87 / 1.000 KH	104,09	93,77	7,92/1000 KH	88,01
	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita	15%	14%	12,10%	11,86%	119,33	115,29	13	108,76
	Angka kesakitan	12,96	12,75	13,79	16,50	93,60	70,59	12,32	61,03

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Nasional RPJMN Kemkenkes RI Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	194/100.000 KH	183/100.000 KH	112,72/100.000 KH	90,55/100.000 KH	141,90	150,52
	Angka kematian bayi	17,6/1000 KH	16/1000 KH	8,21 / 1.000 KH	8,87 / 1.000 KH	153,35	144,56
	Prevalensi Stunting	16	14%	10,5	11,86%	134,38	115,29
	Angka kesakitan	12,96%	12,75	13,79	16,50	88,07	70,59

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (Empat) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2024 , disimpulkan bahwa 3 (Tiga) indikator sasaran berkriteria **Sangat Baik** dan 1 (Satu) indikator berkritria **Baik**

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, yang menjadi tujuan Dinas Kesehatan adalah adalah Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan dengan indikator :

1. Angka Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting dan
3. Angka Kesakitan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 tujuan 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	210/100.000 KH	205/100.000 KH	112,72/100.000 KH	90,55/100.000 KH	142,19	155,83
	Angka kematian bayi	8,56/1000 KH	8,35/1000 KH	8,21 / 1.000 KH	8,87 / 1.000 KH	96,34	93,77
	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)	15	14	12,10	11,86	119,33	115,29
	Angka kesakitan	12,96	12,75	13,79	16,50	88,07	70,59

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan RPJMN KEMENKES RI Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	194/100.000 KH	183/100.000 KH	112,72/100.000 KH	90,55/100.000 KH	141,90	150,52
	Angka kematian bayi	17,6/1000 KH	16/1000 KH	8,21 / 1.000 KH	8,87 / 1.000 KH	153,35	144,56
	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)	16	14	10,5	11,86	134,38	115,29
	Angka kesakitan	12,96	12,75	13,79	16,50	88,07	70,59

a). Angka Kematian Ibu

AKI (Angka Kematian Ibu) adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera atau kejadian insidental.

AKI dihitung dengan menggunakan formulasi :

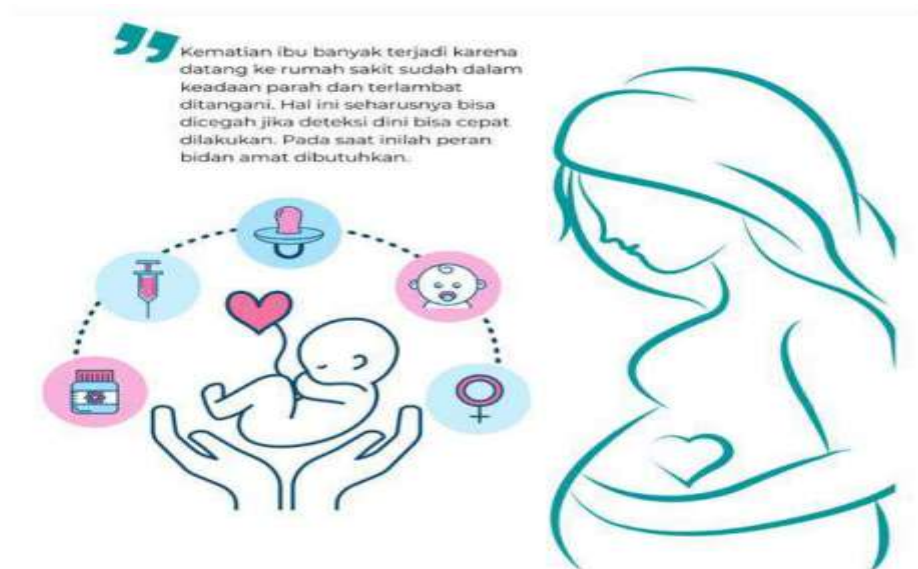
$$\text{AKI} = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah lahir hidup}} \times 100.000$$

1) Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	210/100.000 KH	205/100.000 KH	112,72/100.000 KH	90,55/100.000 KH	142,19	155,83

2) Perbandingan Target RPJMN Kemenkes RI Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	194/100.000 KH	183/100.000 KH	112,72/100.000 KH	90,55/100.00 KH	141,90	150,52



Di Kabupaten Solok pada tahun 2023 jumlah kematian ibu sebesar 7 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 5 kasus. Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa yang akan datang.

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan dua tahun terakhir

Tabel Angka Kematian Ibu 3 Tahun terakhir

No	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2026 Renstra	% Capaian Renstra
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	148	210	205	78,95	112,72	90,55	146,65	146,32	155,83	195	153,56

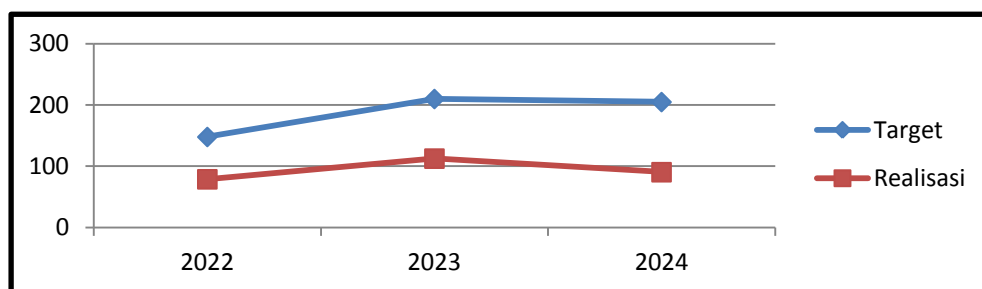
Angka Kematian ibu pada tahun 2024 sebesar 90,55/100.000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 112,72/100.000 kelahiran hidup, Seperti terlihat pada tabel diatas dan apabila kita lihat pada target RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2024, capaian Kinerja Angka Kematian Ibu sudah 155,83%

- 4) Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Angka Kematian ibu pada tahun 2023 sebesar 112,72/ 100.000 KH dengan jumlah lahir hidup 6.210 dan terjadi penurunan AKI pada tahun 2024 yaitu 90,55/ 100.000 KH dengan jumlah lahir hidup 5.522, dan untuk capaian capaian Nasional

adalah 110,47/100.000 KH dan Capaian Provinsi Sumatera Barat 122,17/100.00 KH, untuk target AKI Kabupaten Solok tersebut sudah diatas target Nasional dan Provinsi Yaitu 305/100.000 KH, sedangkan target Propinsi Sumatera Barat masih mengacu pada target Nasional. Selanjutnya kecenderungan AKI pada tiga tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini :

**Angka kematian Ibu serta target di Kabupaten Solok
Tahun 2022 – 2024**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2024

5) Analisa penyebab keberhasilan serta solusi yang telah dilakukan

Angka kematian Ibu pada tahun 2024 sebesar 90,55. per 100.000 KH (5 Kasus Kematian Ibu), kecendrungan penurunan jumlah kematian ibu dalam 3 tahun terakhir ini dapat dilihat pada grafik diatas. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu daerah dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup.

Berdasarkan hasil audit maternal perinatal (AMP) yang telah dilakukan pada tahun 2024 penyebab kematian ibu tersebut antara lainnya seperti : perdarahan eklampsia dan preklamsia berat serta adanya penyakit bawaan ibu seperti penyakit jantung. Dari kasus yang terjadi 2 tahun belakangan yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawat daruratan Obstetri Ginekology untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal care) menjadi 6 (enam) kali, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan 6 (enam) tangan, pendampingan tim ahli (Sp.A dan SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi
2. Peningkatan program P4K (Program perencanaan dan pencegahan komplikasi)
3. Kunjungan dokter spesialis (anak dan kandungan) ke puskesmas minimal 1 x sebulan
4. Pelaksanaan telekonsultasi dalam rangka menurunkan AKI dan AKB
5. Penguatan sistem rujukan dengan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) dalam penanganan kegawatdaruratan dan maternal dan neonatal
6. Memperkuat peran tokoh, tokoh masyarakat dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

6) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Angka Kematian Ibu adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi
			Pagu	Realisasi	Anggaran
1	Angka Kematian Ibu	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk IKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota			
		Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp. 629.451.000	Rp. 441.610.827	70,16
		Pengelolaan kesehatan Ibu bersalin	Rp. 519.693.708	Rp. 202.100.708	38,89
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp. 49.156.000	Tp. 17.175.000	34,94
		Jumlah		Rp. 1.198.300.708	Rp. 660.886.535

Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Tahun Anggaran 2024



7) Rencana tindak lanjut untuk penurunan Angka Kematian Ibu untuk tahun 2025 :

1. Peningkatan ilmu dan keterampilan petugas kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan
2. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui On Job Training dan refresher penanggungjawab program
3. Pemenuhan SDM Kesehatan melalui rekrutmen CPNS, PPPK dan permintaan tenaga melalui program Nusantara Sehat dengan membuat usulan sesuai dengan Anjab ABK
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu melalui : peningkatan pembinaan kemitraan dukun dengan bidan, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, mengoptimalkan peran dan tupoksi tenaga kesehatan khususnya bidan jorong serta melaksanakan evaluasi berkala melalui rapat koordinasi Program Kesehatan Ibu dan Anak
5. Penguatan program dan kegiatan melalui pembinaan kelas ibu hamil, peningkatan gizi ibu hamil melalui PMT bumil KEK dan mengurangi kasus anemia pada remaja putri serta menguatkan peran kader kesehatan di lapangan
6. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
7. Pemantapan sistem rujukan

8. Memperkuat kegiatan Promosi Kesehatan di semua tatanan

b). Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator kesehatan sebuah negara. Menurut WHO, kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara.

AKB dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup}} \times 1.000$$

1) Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka kematian bayi	8,56/1000 KH	8,35/1000 KH	8,21 / 1.000 KH	8,87 / 1.000 KH	104,09	93,77

2) Perbandingan Target RPJMN Kemenkes RI Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka kematian bayi	17,6/1000 KH	17,6/1000 KH	8,21 / 1.000 KH	8,87 / 1.000 KH	153,35	144,56

Jumlah kematian bayi tahun 2023 adalah 51 kasus terjadi penurunan menjadi 49 kasus untuk tahun 2024. Apabila di bandingkan dengan target nasional realisasi Kabupaten Solok sudah melebihi target.

3). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan dua tahun terakhir

Tabel Angka Kematian Bayi 3 Tahun terakhir

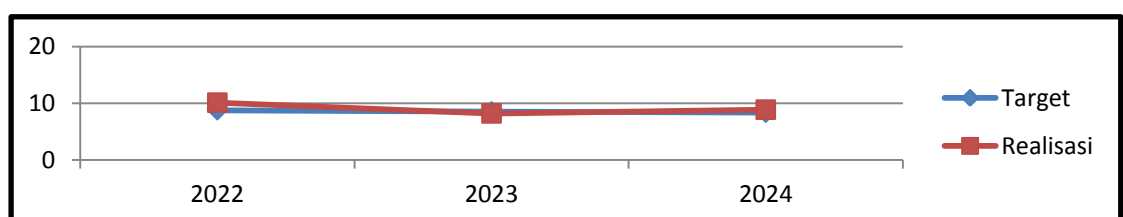
No	IKU	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Target 2026 Renstra	% Capaian Renstra
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	Menurunnya jumlah kematian bayi	Per 1000 KH	8,78	8,56	8,35	10,10	8,21	8,87	84,96	104,09	93,77	7,92	88,01

4). Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional

Target AKB (Angka Kematian Bayi) Kabupaten Solok pada tahun 2024 sebesar 8,35/1.000 KH jauh lebih tinggi dari target Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yaitu 16/1000 KH. Pada tahun 2022 jumlah absolut kematian bayi sebesar 64 kasus bayi meninggal dari 6.333 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 51 kasus dari 6.210 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan kematian bayi lagi menjadi 49 dari 5.522 kelahiran hidup. Capaian AKB pada tahun 2023 yaitu 8,21/1.000 kelahiran hidup, menunjukkan adanya peningkatan kasus kematian di tahun 2024 yaitu 8,87/1.000, tetapi secara angka absolut terjadi penurunan angka kematian bayi dari tahun sebelumnya . untuk capaian Nasional 8,36/ 1000 KH dan Capaian Provinsi 9,66/1.000 KH. Penyebab Kematian bayi terbanyak disebabkan oleh berat badan lahir rendah/preterm dan asfiksia. Penyebab ini sangat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu sejak sebelum hamil, yaitu pada masa remaja atau sebagai calon pengantin untuk meningkatkan kesehatan sejak remaja calon pengantin maka diperlukan kerjasama dan dukungan dari lintas sektor terkait.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada 3 tahun terakhir dari tahun 2022 – 2024 disajikan dalam gambar berikut ini.

Angka Kematian Bayi serta Target di Kabupaten Solok Tahun 2022 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Gambar ini memperlihatkan kecenderungan penurunan AKB dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

5). Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Solok antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan ANC (Ante Natal Care) pada ibu hamil dan peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan keehatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir mulai dari kunjungan 1 (KN 1) sampai kunjungan ke 3 (KN 3)
3. Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Nagari yaitu kegiatan yang di fasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.

Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi Tahun Anggaran 2024





3) Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Angka Kematian Bayi adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	Angka Kematian bayi	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk IKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp. 124.964.981	Rp. 122.430.100	97,97
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 167.730.000	Rp. 92.831.190	55,35
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 1.939.236.350	Rp. 1.327.064.400	68,43
			Rp. 2.231.931.331	Rp. 1.542.325.590	69,11

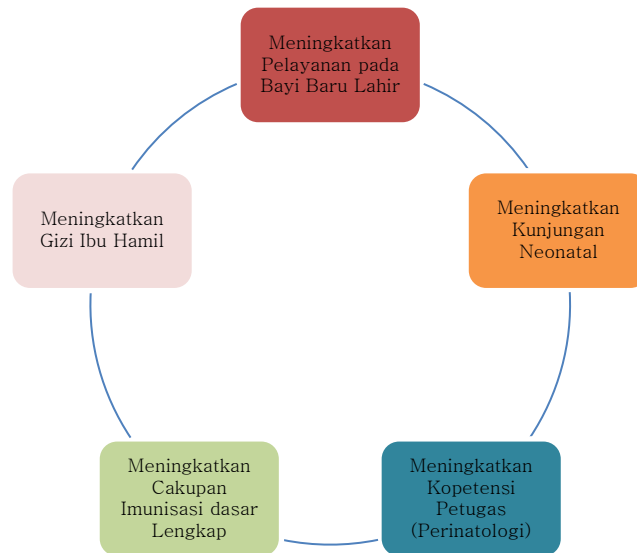
4) Rencana tindak lanjut untuk penurunan Angka Kematian Bayi untuk tahun 2024 :

Rencana tindak lanjut untuk menurunkan Angka kematian Bayi (AKB) ini pada dasarnya hampir sama dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang meliputi :

1. Pemberian PMT ibu hamil KEK dan pencegahan anemia pada remaja putri dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri
2. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan pada neonatal meliputi manajemen asfiksia pada neontatus, penanganan BBLR serta pencegahan infeksi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kemitraan bersama Dokter Spesialis Anak untuk peningkatan kompetensi petugas

3. Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko
4. Peningkatan sarana prasarana puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Rencana Tindak Lanjut Menurunkan Angka Kematian Bayi



c). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada anak Balita)

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Stunting biasanya terjadi karena kekurangan gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang akan berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kerentanan terhadap penyakit, rendahnya produktifitas, gangguan perkembangan metabolic dan fisiologik. Stunting juga meningkatkan risiko penyakit degeneratif ketika dewasa seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular.

Definisi Operasional untuk indikator prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) adalah Persentase anak umur 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD.

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) dihitung dengan formulasi :

$$= \frac{\text{Jumlah Balita Pendek}}{\text{Jumlah Balita diukur panjang atau tinggi badan}} \times 1.000$$

Balita gizi buruk pada tahun 2024 sebanyak 6 orang dan semuanya mendapat perawatan sesuai standar. Untuk Balita stunting berdasarkan EPPGBM (Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) berjumlah 3.375 dari 28.446 balita yang ditimbang

1) Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)	15%	14%	12,10%	11,86%	119,33	115,29

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Target Prevalensi Stunting pada Balita tahun pada tahun 2024 adalah 14% dengan realisasi 11,89% , hal ini mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 dengan realisasi 12,10%

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tiga tahun terakhir

Tabel Prevalensi Stunting pada Balita 3 Tahun terakhir

No	IKU	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Target 2026 Renstra	% Capaian Renstra
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	Prevalensi Stunting	%	17,40	15	14	15,14	12,10	11	112	119,33	121,43	13	108,76

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional dan Propinsi

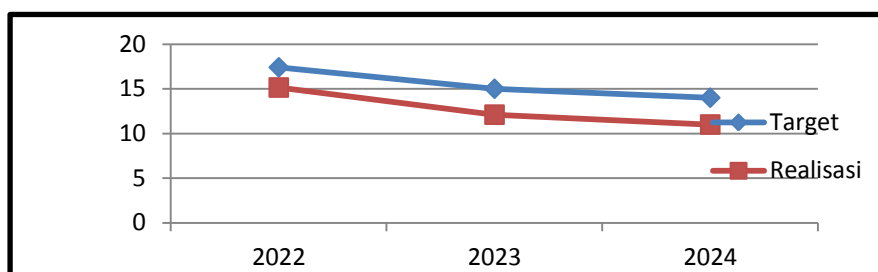
Target Prevalensi Stunting Balita untuk Nasional dan Propinsi yaitu 14%. pada tahun 2024. Kabupaten Solok sudah mencapai target dengan realisasi 11,86%, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar

12,10%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja untuk indikator prevalensi stunting mengalami peningkatan

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Solok harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Permasalahan yang dihadapi adalah pola asuh anak yang salah, terutama diawal pemberian Makanan Pendamping ASI, BBLR yang meningkat, dan penyakit infeksi yang berulang.

Stunting disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu yang meliputi asupan makanan, berat badan lahir, dan keadaan Kesehatan, faktor rumah tangga yang meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan serta faktor lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Kecenderungan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada anak Balita pada 3 tahun terakhir dari tahun 2022 - 2024 disajikan dalam gambar berikut ini

**Angka Prevalensi Stunting serta target di Kabupaten Solok
Tahun 2022 – 2024**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2024

Gambar ini memperlihatkan sudah turunnya Prevalensi Stunting di Kabupaten Solok. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Solok harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Permasalahan yang dihadapi adalah pola asuh anak yang salah, terutama diawal pemberian Makanan Pendamping ASI, BBLR yang meningkat, dan penyakit infeksi yang berulang.

- 4). Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta solusi yang telah dilakukan untuk penurunan Prevalensi Stunting pada balita

Stunting disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu yang meliputi asupan makanan, berat badan lahir, dan keadaan Kesehatan, faktor rumah tangga yang meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan serta faktor lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan.

Terobosan pada tahun 2024 dalam mengatasi stunting ini adalah :

1. Pemberian Makan Bayi dan Balita (PMBA)

Pemberian Makanan Bayi dan Anak sesuai standar emas yaitu Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, MP-ASI dan ASI sampai dengan 2 tahun atau lebih masih menjadi tantangan di Kabupaten Solok, salah satu strategi untuk memperluas cakupan pemberian makan bagi bayi anak sesuai standar adalah melalui pelatihan PMBA di tingkat masyarakat.

Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia dua tahun merupakan salah satu upaya mendasar untuk menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang sekaligus memenuhi hak. Menurut World Health Organization (WHO)/ United Nations Children's Fund (UNICEF), lebih dari 50 % kematian anak balita terkait dengan keadaan kurang gizi, dan dua pertiga diantara kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak, seperti tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dalam satu jam pertama setelah lahir dan pemberian MP-ASI yang terlalu cepat atau terlambat diberikan. Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh lemah, sering sakit dan gagal tumbuh. Oleh karena itu upaya mengatasi masalah kekurangan gizi pada bayi dan anak balita melalui pemberian makanan bayi dan anak yang baik dan benar, menjadi agenda penting demi menyelamatkan generasi masa depan.

Tujuan kegiatan Workshop PMBA ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam upaya peningkatan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, melalui pemberian makan usia 0 – 24 bulan dengan optimal.

2. Pemantauan tumbuh kembang pada Balita.

Anak-anak yang mengalami masalah stunting akan memiliki fisik dengan postur tubuh yang lebih pendek ketimbang anak-anak di usia yang sama

dengannya. Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kamu sebagai orang tua dalam memantau tinggi badan serta berat badan si buah hati secara rutin ke posyandu atau klinik-klinik anak. Hal ini bertujuan untuk bisa mengetahui lebih awal tentang apakah si kecil mengalami gangguan pertumbuhan atau tidak.

3. Meningkatkan Akses Sanitasi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang tidak bersih bisa menjadi tempat yang sangat nyaman bagi kuman penyebab penyakit berkembang biak disana. Dan hal seperti ini tentu saja memberikan peningkatan resiko anak terinfeksi penyakit, misalnya saja diare. Diare merupakan salah satu faktor ke3 dari penyebab anak mengalami stunting. Oleh sebab itu jagalah selalu kebersihan lingkunganmu, karena ini merupakan salah satu cara mencegah anak stunting.

- 6). Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan Penurunan Prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Penurunan Prevalensi Stunting adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi
					Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	6.380.843.342	5.771.144.655	90,44
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.380.843.342	5.771.144.655	90,44
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Rp. 4.653.655.776	Rp. 3.128.869.879	67,23
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.154.396.408	Rp. 1.125.929.868	97,53
		Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 572.791.158	Rp. 1.516.344.908	90,15
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 327.380.000	Rp. 326.260.000	99,66
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran	Rp. 327.380.000	Rp. 326.260.000	99,66

		serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan	Rp. 327.380.000	Rp. 326.260.000	99,66
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.084.110.300	Rp. 1.410.324.500	67,67
		Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp. 2.084.110.300	Rp. 1.410.324.500	67,67

7). Rencana tindak lanjut untuk penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita untuk tahun 2025

1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan pada balita gizi kurang yang diawali dengan pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan PMT serta pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk.
2. Perbaikan sanitasi dengan melaksanakan advokasi dan koordinasi bersama nagari untuk melakukan kegiatan percepatan ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan salah satunya dengan pemicuan untuk merubah perilaku masyarakat menggunakan jamban sehat serta penguatan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Kampanye ASI Eksklusif
3. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dengan advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat kecamatan
4. Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen penyakit Balita
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan melalui upaya peningkatan gizi keluarga

Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi Tahun Anggaran 2024



Rencana Tindak Lanjut Menurunkan Prevalensi Stunting



Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketersediaan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terstandar pada semua Tingkatan Usia secara Holistik dan Berkelanjutan	Menurunnya Angka Kematian Ibu	205/100.000 KH	90,55/100.000 KH	155,83	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
						Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	629.451.000	441.610.827	70,16
						Pengelolaan kesehatan Ibu bersalin	519.693.708	202.100.708	38,89
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.156.000	17.175.000	34,94
						Total	1.198.300.708	651.886.535	54,40
2		Menurunnya Angka Kematian Bayi	8,35/1000 KH	8,87/1000 KH	94	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
						Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp. 124.964.981	Rp. 122.430.100	97,97
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 167.730.000	Rp. 92.831.190	55,35
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Tp. 1.939.236.350	Rp. 1.327.064.400	68,34
						Total	Rp. 2.231.931.331	Rp. 1.542.325.690	69,10

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
3		Menurunnya Prevalensi Stunting	14	11,86	115,28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Rp. 4.653.655.776	Rp. 3.128.869.879	67,23
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.154.396.408	Rp. 1.125.929.868	97,53
						Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 572.791.158	Rp. 1.516.344.908	90,15
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota			
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan	Rp. 327.380.000	Rp. 326.260.000	99,66
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
						Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp. 2.084.110.300	Rp. 1.410.324.500	67,67
						Total	Rp8.792.333.642	Rp. 7.507.729.155	85,39

d). Angka Kesakitan

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang per 1000 penduduk yang bisa terkena penyakit (Kardjati dan Alisjahbana, 1985). Tingkat angka kesakitan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan angka kematian karena apabila angka kesakitan tinggi maka akan memicu kematian sehingga otomatis menyebabkan angka kematian juga tinggi. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan

Angka kesakitan dapat berupa angka insiden atau prevalensi suatu penyakit. Angka kesakitan dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan.

1). Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka kesakitan	12,96	12,75	13,79	16,50	93,60	70,59

Morbiditas atau Angka Kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, sedangkan keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari – hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak di alami oleh penduduk adalah demam panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/ sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Untuk tahun 2024 capaian kinerja tersebut 70,59%. Capaian ini menurun jika di bandingkan dengan tahun 2023 yaitu 93,60%. Hal ini berarti terjadi peningkatan frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat.

Apabila di bandingkan dengan Kabupaten Kota yang lain untuk angka kesakitan Kabupaten Solok pada saat ini pada nomor 6 dari 19 kabupaten Kota di Sumatera Barat

2). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tiga tahun terakhir

Tabel Angka Kesakitan 3 Tahun terakhir

No	IKU	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Target 2026 Renstra	% Capaian Renstra
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	Angka Kesakitan	%	13,18	12,96	12,75	11,39	13,79	16,50	110,67	93,60	70,59	12,32	61,03

Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi Tahun Anggaran 2024



- 3). Analisa keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta solusi yang telah dilakukan untuk penurunan Prevalensi Stunting pada balita

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator angka kesakitan antara lain :

1. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (a. Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan pelaksanaan kunjungan keluarga, melakukan updating data PIS-PK by name by address, melakukan intervensi lanjutan terhadap keluarga berisiko dan melakukan monitoring dan evaluasi terintegrasi seluruh program. b. Peningkatan kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) melalui posyandu terintegrasi meliputi pemantauan tumbuh kembang balita, skrining kesehatan usia produktif dan lansia serta pelayanan imunisasi dan KB) Dukungan lintas sektor terkait
2. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit meliputi deteksi dini factor risiko, penemuan kasus aktif, pemantauan pengobatan penyakit menular serta penyelidikan dan respon kasus atau KLB (Kejadian Luar Biasa).
3. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas melalui reakreditasi puskesmas sehingga pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas terstandar.
4. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader kesehatan dengan pelatihan tenaga kesehatan/petugas puskesmas sesuai layanan kluster siklus hidup serta workshop kader kesehatan.
5. Menjalin kerjasama dengan wilayah Kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Solok. (PIS-PK) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) sebagai upaya untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
6. Melakukan kerjasama dengan FKTP lainnya terkait pelayanan kesehatan terutama deteksi dini penyakit menular dan tidak menular berupa skrining kesehatan terutama pada kelompok berisiko
7. Melakukan inovasi pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan kesehatan

Namun terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sehingga Angka Kesakitan di Kabupaten Solok mengalami peningkatan berdasarkan data dari BPS Tahun 2024 antar lain :

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang masih kurang dalam memberikan pelayanan sesuai standar dan kondisi alat yang belum memadai karena kurangnya anggaran (kalibrasi)
2. Masih kurangnya ketersediaan tenaga sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai standar (9 jenis tenaga kesehatan)
3. Faktor Pendidikan (Kurangnya pengetahuan keluarga) Ekonomi (Asupan makanan yang kurang)
4. Masih adanya dukun beranak aktif dan kepercayaan masyarakat terhadap dukun
- 5). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Penurunan Angka Kesakitan

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi
			Pagu	Realisasi	Anggaran
1	Angka Kesakitan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / kota			
		Pengelolaan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Rp. 32.950.000	Rp. 7.550.000	22,91
		Pelayanan Penyakit Menular dan tidak Menular	Rp. 4.268.573.800	Rp. 3.230.697.892	75,69
		Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza	Rp. 45.494.400	Rp. 40.928.800	89,96
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rp. 555.505.700	Rp. 477.639.628	85,98
		Pengelolaan Survailans Kesehatan	Rp. 396.052.000	Rp. 183.258.029	46,27
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 623.365.200	Rp. 607.373.930	97,43
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Rp. 10.690.000	Rp. 9.980.810	93,37
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita ODGJ	Rp. 5.110.000	Rp. 4.760.000	93,15
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidkian dasar	Rp. 417.300.000	Rp. 352.184.910	84,40
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp. 6.140.000	Rp. 3.750.000	61,07
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp. 16.874.900	Rp. 16.014.500	94,90
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Rp. 144.331.900	Rp. 45.644.000	31,62

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Rp. 171.574.248	Rp. 165.272.211	96,33
		pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Rp. 70.000.000	Rp. 5.459.918	7,80
		Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian obat massal)	Rp. 36.700.000	Rp. 5.000.000	13,62
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Rp. 105.504.912	Rp. 93.093.902	88,24
		Pengelolaan jaminan kesehatan	Rp. 12.756.747.700	Rp. 12.693.318.900	99,50
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/ kota			
		Pengembangan Puskesmas	Rp. 11.043.574.507	Rp. 10.850.900.060	98,26
		Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah sakit	Rp. 100.000.000	Rp. 98.939.439	98,94
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp. 1.251.351.800	Rp. 1.215.712.346	97,15
		Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 2.346.074.200	Rp. 2.283.818.492	97,34
		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 61.405.800	Rp. 55.070.000	89,68
		Pengembangan Rumah Sakit	Rp. 684.216.829	Rp. 681.254.834	90,93
		Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai valsin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Rp. 6.532.882.818	Rp. 6.531.448.007	99,98
		Pengadaan Alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Rp. 4.741.714.285	Rp. 4.568.091.706	96,34
		Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 173.474.100	Rp. 111.877.200	
		Operasional pelayanan Rumah sakit	Rp. 2.402.155.686	Rp. 2.184.333.662	90,93
		Operasional pelayanan Puskesmas	Rp. 7.081.763.298	Rp. 3.614.214.511	51,04
		Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya IFK/LAB	Rp. 2.256.063.321	Rp. 2.016.299.828,24	89,37

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
		Pelayanan Akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	Rp. 63.633.708	Rp. 62,570.709	98,33
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp. 17.960.000	Rp. 2.550.000	14,20
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp. 19.626.579	Rp.18.745.700	95,51
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp.49.156.000	Rp.17.175.000	34,94
		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terinterasi			
		Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp.15.205.000	Rp.13.890.000	91,35
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 5.544.000	Rp. 3.612.000	65,15
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp. 919.971.970	Rp.880.656.900	95,73
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 509.478.321	Rp. 416.834.000	91,82
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.153.952.300	Rp.1.015.56.080	88,01
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
		Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.10.539.650	Rp.9.830.234	93,27
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga			

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.257.343.000	Rp.237.683.600	92,36
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp.174.674.000	Rp.164.184.900	94,00
		Total	Rp. 61.599.249.209	Rp.54.997.182.638,24	89,28

6). Rencana tindak lanjut untuk penurunan Angka Kesakitan di Kabupaten Solok untuk tahun 2025 :

1. Perluasan sosialisasi dan informasi kesehatan kepada masyarakat.
2. Peningkatan ilmu dan keterampilan petugas kesehatan melalui pendidikan dan latihan
3. Penguatan sistem rujukan dengan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)
4. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD
5. Peningkatan Edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan Promosi Kesehatan

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Indikator Angka Kesakitan dan Kematian

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya	Angka kesakitan	12,75	16,50	70,59	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			
	ketersediaan akses masyarakat					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / kota			
	terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua					Pengelolaan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Rp. 32.950.000	Rp. 7.550.000	22,91
	tingkatan usia secara holistik dan					Pelayanan Penyakit Menular dan tidak Menular	Rp. 4.268.573.800	Rp. 3.230.697.892	75,69
	berkelanjutan					Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza	Rp. 45.494.400	Rp. 40.928.800	89,96
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rp. 555.505.700	Rp. 477.639.628	85,98
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp. 396.052.000	Rp. 183.258.029	46,27
						Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 623.365.200	Rp. 607.373.930	97,43
						Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Rp. 10.690.000	Rp. 9.980.810	93,37
						Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita ODGJ	Rp. 5.110.000	Rp. 4.760.000	93,15
\						Pengelolaan pelayanan	Rp. 417.300.000	Rp. 352.184.910	84,40

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
						kesehatan pada usia pendidkan dasar			
1						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp. 6.140.000	Rp. 3.750.000	61,07
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp. 16.874.900	Rp. 16.014.500	94,90
						Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Rp. 144.331.900	Rp. 45.644.000	31,62
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisonal lainnya	Rp. 171.574.248	Rp. 165.272.211	96,33
						pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratutium Rujukan Nasional	Rp. 70.000.000	Rp. 5.459.918	7,80
						Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutam Pasca Imunisasi dan Pemberian obat massal)	Rp. 36.700.000	Rp. 5.000.000	13,62
						Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Rp. 105.504.912	Rp. 93.093.902	88,24

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
						Pengelolaan jaminan kesehatan	Rp. 12.756.747.700	Rp. 12.693.318.900	99,50
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/ kota			
						Pengembangan Puskesmas	Rp. 11.043.574.507	Rp. 10.850.900.060	98,26
						Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah sakit	Rp. 100.000.000	Rp. 98.939.439	98,94
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp. 1.251.351.800	Rp. 1.215.712.346	97,15
						Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 2.346.074.200	Rp. 2.283.818.492	97,34
						Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp.61.405.800	Rp.55.070.000	89,68
						Pengembangan Rumah Sakit	Rp. 684.216.829	Rp. 681.254.834	90,93
						Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai valsin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Rp. 6.532.882.818	Rp. 6.531.448.007	99,98
						Pengadaan Alat kesehatan/ alat penunjang medik	Rp. 4.741.714.285	Rp. 4.568.091.706	96,34

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
						fasilitas pelayanan Kesehatan (Dinkes)			
						Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 173.474.100	Rp. 111.877.200	
						Operasional pelayanan Rumah sakit	Rp. 2.402.155.686	Rp. 2.184.333.662	90,93
						Operasional pelayanan Puskesmas	Rp. 7.081.763.298	Rp. 3.614.214.511	51,04
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya IFK/LAB	Rp. 2.256.063.321	Rp. 2.016.299.828,24	89,37
						Pelayanan Akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	Rp. 63.633.708	Rp. 62,570.709	98,33
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp. 17.960.000	Rp. 2.550.000	14,20
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp. 19.626.579	Rp.18.745.700	95,51
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp.49.156.000	Rp.17.175.000	34,94

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
						Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terinterasi			
						Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp.15.205.000	Rp.13.890.000	91,35
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 5.544.000	Rp. 3.612.000	65,15
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp. 919.971.970	Rp.880.656.900	95,73
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 509.478.321	Rp. 416.834.000	91,82
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.153.952.300	Rp.1.015.56.080	88,01
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman			

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
						Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.10.539.650	Rp.9.830.234	93,27
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga			
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.257.343.000	Rp.237.683.600	92,36
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
						Pemeriksaan Post Market	Rp.174.674.000	Rp.164.184.900	94,00

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
						pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
						Total	Rp. 61.599.249.209	Rp.54.997.182.638,24	89,28

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran APBD dengan rincian :

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	83.390.550.289	80.527.036.295	96,57
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.724.495	105.184.208	99,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.547.804	33.239.504	99,08
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.925.108	58.898.908	99,96
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.614.705.197	79.799.884.694	96,55
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.402.166	94.619.912	97,14
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester skpd	193.599.204	192.346.454	99,35
7	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	1.800.000	1.800.000	100
8	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	85.516.677	83.057.938	97,12
9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84.292.548	81.988.658	97,27
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.347.159	172.300.375	99,40
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.334.375	473.514.466	94,64
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.887.380	29.040.501	97,17
14	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	100
15	Penyediaan Jasa Perizinan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	270.270.000	268.913.929	99,50
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22.871.400	22.772.420	99,57

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
17	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	50.875.809.009	45.201.957.005,47	88,85
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	68.270.636.072	59.146.127.264	86,63
19	Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	629.451.000	441.610.827	70,16
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	519.693.708	202.100.708	38,89
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	124.964.981	122.430.100	97,97
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	167.730.000	92,831.190	55,35
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	417.300.000	352.184.910	84,40
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6.140.000	3.750.000	61,07
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	16.874.900	16.014.500	94,90
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.690.000	9.980.810	93,37
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	623.365.200	607.373.390	97,43
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.110.000	4.760.000	93,15
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	555.505.700	477.639.628	85,98
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.950.000	7.550.000	22,91
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	144.331.900	45.644.000	31,62
32	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.653.655.776	3.128.869.879	67,23

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.154.396.408	1.125.929.868	97,53
34	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	572.791.158	516.344.908	90,15
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	171.574.248	165.272.211	96,33
36	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	396.052.000	183.258.029	46,27
37	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	45.494.400	40.928.800	89,96
38	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.268.573.800	3.230.697.892	75,69
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.756.747.700	12.693.318.900	99,50
40	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	70.000.000	5.459.918	7,80
41	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.402.155.686	2.184.333.662	90,93
42	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.081.863.298	3.614.214.511	51,04
43	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya IFK/LAB	2.256.063.321	2.016.299.828,24	89,37
44	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	63.633.708	62,570.708	98,33
45	Invenstigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	36.700.000	5.000.000	13,62
46	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	105.504.912	93.093.902	88,24
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan GIV (ODHIV)	17.960.000	2.550.000	14,20
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.156.000	17.175.000	34,94

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	19.626.579	18.745.700	95,51
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.939.236.350	1.327.064.400	68,43
51	Pengembangan Puskesmas	11.043.574.507	10.850.900.060	98,26
52	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	98.939.439	98,94
53	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	1.251.351.800	1.215.712.346	97,15
54	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	2.346.074.200	2.283.818.492	97,35
55	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	4.741.714.285	4.568.091.706	96,34
56	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	61.405.800	55.070.000	89,68
57	Pengembangan Rumah Sakit	684.216.829	681.254.837	99,57
58	Pengadaan obat, bahan habis pakai, medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di failitas kesehatan	6.532.882.818	6.531.448.007	99,98
59	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP , Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	173.474.100	111.877.200	64,49
60	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15.205.000	13.890.000	91,35
61	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.544.000	3.612.000	65,15
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	442.556.650	411.698.734	93,03
62	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.539.650	9.830.234	93,27

No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	257.343.000	237.683.600	92,36
64	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	174.674.000	164.184.900	94,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.583.402.591	2.313.053.980	89,54
65	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	919.971.970	880.656.900	95,73
66	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	509.478.321	416.834.000	81,82
67	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.153.952.300	1.015.563.080	88,01
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.411.490.300	1.736.584.500	72,01
68	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	327.380.000	326.260.000	99,66
69	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.084.110.300	1.410.324.500	67,37
	J U M L A H	207.974.444.911	189.419.942.778,07	91,08

Penggunaan anggaran langsung APBD apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	629.451.000	441.610.827	70,16
		Pengelolaan kesehatan Ibu bersalin	519.693.708	202.100.708	38,89
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.156.000	17.175.000	34,94
		Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp. 124.964.981	Rp. 122.430.100	97,97
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 167.730.000	Rp. 92.831.190	55,35
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 1.939.236.350	Rp. 1.327.064.400	68,34
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Rp. 4.653.655.776	Rp. 3.128.869.879	67,23
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.154.396.408	Rp. 1.125.929.868	97,53
		Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 572.791.158	Rp. 1.516.344.908	90,15
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/ kota			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan	Rp. 327.380.000	Rp. 326.260.000	99,66
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
		Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp. 2.084.110.300	Rp. 1.410.324.500	67,67
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / kota			

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
		Pengelolaan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Rp. 32.950.000	Rp. 7.550.000	22,91
		Pelayanan Penyakit Menular dan tidak Menular	Rp. 4.268.573.800	Rp. 3.230.697.892	75,69
		Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza	Rp. 45.494.400	Rp. 40.928.800	89,96
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rp. 555.505.700	Rp. 477.639.628	85,98
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp. 396.052.000	Rp. 183.258.029	46,27
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 623.365.200	Rp. 607.373.930	97,43
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Rp. 10.690.000	Rp. 9.980.810	93,37
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita ODGJ	Rp. 5.110.000	Rp. 4.760.000	93,15
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 417.300.000	Rp. 352.184.910	84,40
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp. 6.140.000	Rp. 3.750.000	61,07
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp. 16.874.900	Rp. 16.014.500	94,90
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Rp. 144.331.900	Rp. 45.644.000	31,62
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Rp. 171.574.248	Rp. 165.272.211	96,33
		pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Rp. 70.000.000	Rp. 5.459.918	7,80
		Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutani Pasca Imunisasi dan Pemberian obat massal)	Rp. 36.700.000	Rp. 5.000.000	13,62
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Rp. 105.504.912	Rp. 93.093.902	88,24
		Pengelolaan jaminan kesehatan	Rp. 12.756.747.700	Rp. 12.693.318.900	99,50

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/ kota			
		Pengembangan Puskesmas	Rp. 11.043.574.507	Rp. 10.850.900.060	98,26
		Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah sakit	Rp. 100.000.000	Rp. 98.939.439	98,94
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp. 1.251.351.800	Rp. 1.215.712.346	97,15
		Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 2.346.074.200	Rp. 2.283.818.492	97,34
		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp.61.405.800	Rp.55.070.000	89,68
		Pengembangan Rumah Sakit	Rp. 684.216.829	Rp. 681.254.834	90,93
		Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai valsin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Rp. 6.532.882.818	Rp. 6.531.448.007	99,98
		Pengadaan Alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Rp. 4.741.714.285	Rp. 4.568.091.706	96,34
		Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 173.474.100	Rp. 111.877.200	64,49
		Operasional pelayanan Rumah sakit	Rp. 2.402.155.686	Rp. 2.184.333.662	90,93
		Operasional pelayanan Puskesmas	Rp. 7.081.763.298	Rp. 3.614.214.511	51,04
		Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya IFK/LAB	Rp. 2.256.063.321	Rp. 2.016.299.828,24	89,37
		Pelayanan Akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	Rp. 63.633.708	Rp. 62,570.709	98,33
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp. 17.960.000	Rp. 2.550.000	14,20
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp. 19.626.579	Rp.18.745.700	95,51

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp.49.156.000	Rp.17.175.000	34,94
		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terinterasi			
		Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp.15.205.000	Rp.13.890.000	91,35
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 5.544.000	Rp. 3.612.000	65,15
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp. 919.971.970	Rp.880.656.900	95,73
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 509.478.321	Rp. 416.834.000	91,82
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.153.952.300	Rp.1.015.56.080	88,01
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
		Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.10.539.650	Rp.9.830.234	93,27
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Rp.257.343.000	Rp.237.683.600	92,36

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
		Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp.174.674.000	Rp.164.184.900	94,00
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	83.390.550.289	80.527.036.295	96.57
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.724.495	105.184.208	99,49
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.547.804	33.239.504	99,08
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.925.108	58.898.908	99,96
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.614.705.197	79.799.884.694	96,55
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.402.166	94.619.912	97,14
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester skpd	193.599.204	192.346.454	99,35
		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	1.800.000	1.800.000	100
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	85.516.677	83.057.938	97,12
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	84.292.548	81.988.658	97,27
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.347.159	172.300.375	99,40
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.334.375	473.514.466	94,64
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.887.380	29.040.501	97,17
		Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	100
		Penyediaan Jasa Perizinan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.270.000	268.913.929	99,50
		Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	22.871.400	22.772.420	99,57
3	Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	50.875.809.009	45.201.957.005,47	88,85
		Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	50.875.809.009	45.201.957.005,47	88,85
		TOTAL	207.974.444.911	189.419.942.778	91,08

Anggaran APBD Kabupaten Solok untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 207.974.444.911, digunakan untuk sebesar Rp. 189.419.942.778 atau 91,08 %.

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok pada tahun 2024 telah dilakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya diantaranya adalah :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran			
		2024	2024	2024	Pagu	Realisasi	Capaian	
1. Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	205/100.000 KH	90,55/100.000 KH	155,83	1.149.144.708	643.711.535	56,02	
	Angka Kematian Bayi	8,35/1000 KH	8,87 / 1000 KH	93,77	2.231.931.331	1.542.325.690	69,10	
	Prevalensi Stunting	14%	11,86%	115,29	8.792.333.642	6.507.729.155	74,02	
	Angka Kesakitan	12,75	16,50	70,59	61.534.675.932	54.997.183.098	89,38	
2. Meningkatkan tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	3,22	3,22	104,66	83.390.550.289	80.527.036.295	96,57	
3. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Kepatuhan terhadap standar pelayanan	70%	97,73	139,61	50.875.809.009	45.201.957.005	88,85	Efektifitas
RATA-RATA Capaian Kinerja				113,29				124,39
TOTAL Anggaran					207.974.444.911	189.419.942.778	91,08	

Tingkat Efisiensi = 100% - 91,08% = 8,92%

Tingkat Efektifitas = $\frac{113,29\%}{91,08\%} \times 100\% = 124,39\%$

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Dari 4 (Empat) indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 , disimpulkan bahwa 3 (Tiga) indikator kinerja berkriteria **Sangat Baik** dan 1 (Satu) indikator berkriteria **Baik** Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Bupati, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Solok dan seluruh aparat Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 2024

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai

target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.